



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BIRO HUKUM, HUMAS DAN PENGAWASAN INTERNAL
SUB UNIT KERJA : BIRO HUKUM, HUMAS DAN PENGAWASAN INTERNAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 622479

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.662.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 71 m²/71 m² di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 319.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/140 m² di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 74 m²/100 m² di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 333.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 37 m²/69 m² di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 37 m²/69 m² di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 250.000.000**

1. MOTOR, HONDA NF125TR / SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA/ MINI BUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 87.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV RM3 2WD2.4AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 909.227.191****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---**



Sub Total	Rp.	2.821.727.191
III. HUTANG	Rp.	28.137.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.793.590.191

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 Mei 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.